



Aliansi Masyarakat Tuban Bersatu Gelar Aksi, Desak Evaluasi dan Kelanjutan Program MBG

kabartuban.com - Di tengah munculnya berbagai polemik mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ribuan warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Tuban Bersatu turun ke jalan menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Sekitar 3.000 peserta aksi menggelar demonstrasi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Tuban, Jumat (26/6/2026). Massa yang berasal dari berbagai elemen masyarakat, mulai petani, peternak, pedagang hingga pelaku UMKM, membawa spanduk dan banner bertuliskan dukungan terhadap Program MBG.

Sebelum bergerak menuju DPRD, massa lebih dahulu berkumpul di Jalan Teuku Umar sekitar pukul 08.30 WIB. Mereka kemudian melakukan long march secara tertib menuju lokasi aksi sambil menggaungkan pentingnya keberlanjutan program makan bergizi gratis.

Koordinator aksi, Kurniawan, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas masyarakat yang merasakan manfaat ekonomi dari Program MBG.



"Program ini tidak hanya menyasar anak-anak sebagai penerima manfaat, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Petani tidak lagi kebingungan menjual hasil panen, pedagang dan UMKM ikut merasakan dampaknya, begitu juga peternak," ujarnya.

Menurutnya, Aliansi Masyarakat Tuban Bersatu datang bukan untuk menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut.

Justru mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh apabila ditemukan penyimpangan.

"Kalau memang ada dugaan penyelewengan atau korupsi, segera evaluasi dan tindak tegas sesuai hukum. Jangan sampai kesalahan oknum justru menghentikan program yang manfaatnya dirasakan masyarakat," tegasnya.

Dalam aksi tersebut, massa juga mengajak DPRD Kabupaten Tuban menandatangani pakta integritas sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan Program MBG sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pelaksanaannya.

Kurniawan menegaskan evaluasi yang dimaksud bukan menghentikan program, melainkan memastikan distribusi manfaat berjalan tepat sasaran dan sesuai....

[Baca Selengkapnya....](#)



Isu PHK Satpam PT SBI Tuban Picu Keresahan, FSPMI Ancam Demo Besar

kabartuban.com - Kabar mengenai dugaan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap puluhan anggota Satuan Pengamanan (Satpam) di PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) Pabrik Tuban memicu keresahan di kalangan pekerja. Serikat buruh bahkan mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.

Kekhawatiran itu muncul setelah beredar informasi mengenai rencana pengurangan anggaran operasional Departemen Security yang disebut-sebut akan mulai diterapkan pada awal tahun 2027. Dalam skema yang beredar, efisiensi dilakukan melalui dua pilihan, yakni pengurangan jumlah personel atau pemotongan upah pekerja.

Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Aneka Industri (SPA) FSPMI PT SBI, Shokiful Alfianto,

menilai alasan efisiensi yang dikemukakan perusahaan tidak sejalan dengan kondisi usaha yang terlihat di lapangan.

Menurutnya, aktivitas produksi dan distribusi semen masih berjalan normal bahkan cenderung tinggi. Ia mencon-tohkan lalu lintas kendaraan operasional yang ramai serta adanya ekspor semen ke Amerika Serikat dalam jumlah besar dalam beberapa waktu terakhir.

"Kalau melihat kondisi di lapangan, produktivitas masih tinggi. Karena itu alasan efisiensi tidak masuk akal bagi kami," ujar Shokiful, Senin (22/6/2026).

Bagi serikat pekerja, rencana pengurangan tenaga kerja akan berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat sekitar pabrik. Sebab sebagian besar personel keamanan berasal....

[Baca Selengkapnya....](#)



Haul ke-517 Sunan Bonang Dihadiri Ribuan Peziarah dari Dalam dan Luar Negeri

kabartuban.com - Lautan manusia memadati kawasan Makam Sunan Bonang dan Alun-Alun Tuban dalam rangkaian Haul ke-517 Sunan Bonang. Tidak hanya masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia, ribuan peziarah juga datang dari luar pulau hingga mancanegara untuk mengikuti tradisi religi yang telah berlangsung turun-temurun tersebut.

Haul salah satu Wali Songo ini tidak sekadar menjadi momentum mengenang jasa penyebar Islam di Tanah Jawa, tetapi juga menjadi ruang pertemuan budaya, spiritualitas, dan penggerak ekonomi masyarakat.

Wakil Ketua Panitia Haul Sunan Bonang, Siswanto, mengatakan rangkaian kegiatan tahun ini telah memasuki agenda keenam dari tujuh kegiatan yang telah disiapkan panitia.

“Alhamdulillah seluruh rangkaian berjalan lancar. Mulai dari pertemuan alim ulama, takjil gaib, khataman Al-Qur’an, sunatan massal, hingga hari ini Tahlil Akbar. Antusiasme masyarakat sangat luar biasa,” ujarnya.

Menurutnya, jumlah pengunjung yang datang silih berganti sejak awal rangkaian acara diperkirakan mencapai jutaan orang. Arus peziarah terus berdatangan dari berbagai daerah untuk mengikuti kegiatan haul sekaligus berziarah ke makam Sunan Bonang.

“Kalau dihitung sejak awal rangkaian acara, jumlah pengunjung yang datang ke Tuban bisa mencapai jutaan orang. Bahkan ada wisatawan religi dari luar negeri yang turut hadir,” katanya.

Siswanto menuturkan....

[Baca Selengkapnya....](#)



133 Dispensasi Nikah dalam 5 Bulan, Mayoritas Lulusan SD dan Sudah Lama Berpacaran

kabartuban.com - Pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten Tuban masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Dalam kurun waktu Januari hingga Mei 2026, Pengadilan Agama (PA) Tuban mencatat sebanyak 133 perkara dispensasi nikah (Diska) yang diajukan masyarakat.

Data tersebut menunjukkan bahwa pernikahan usia dini masih menjadi fenomena yang belum sepenuhnya dapat ditekan, meski jumlahnya terus mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Panitera Muda Permohonan

Pengadilan Agama Tuban, Wawan, menjelaskan bahwa sebagian besar pemohon dispensasi nikah berasal dari kalangan berpendidikan dasar. Dari total 133 perkara yang masuk dan telah di putus selama lima bulan pertama tahun ini, sebanyak 100 pemohon tercatat berlatar belakang pendidikan SD, 16 orang lulusan SMP, dan 28 orang lulusan SMA.

Menurutnya, faktor utama yang mendasari pengajuan dispensasi nikah bukan semata-mata karena kehamilan di luar nikah, melainkan karena pasangan yang bersangkutan sudah lama menjalin hubungan atau berpacaran.

“Fakta yang banyak ditemukan adalah mereka sudah lama saling mengenal dan berpacaran,” ujar Wawan.

Jika dirinci per bulan, jumlah perkara yang di putus dispensasi nikah yang masuk ke PA Tuban pada Januari sebanyak 24 perkara, Februari 17 perkara, Maret 16 perkara, April 22 perkara, dan Mei meningkat menjadi 31 perkara.

Meski angka tersebut masih mencapai ratusan kasus, Wawan menilai kondisinya relatif masih dalam batas wajar jika dibandingkan dengan tren beberapa tahun terakhir yang justru

menunjukkan penurunan cukup signifikan.

Berdasarkan data PA Tuban, jumlah permohonan dispensasi nikah pada periode yang sama tercatat sebanyak 516 perkara pada tahun 2022, kemudian turun menjadi 434 perkara pada 2023, sebanyak 300 perkara pada 2024, dan 314 perkara pada 2025. Sementara hingga Mei 2026 tercatat 146 permohonan.

“Kalau melihat tren beberapa tahun terakhir, jumlahnya terus menurun. Untuk kondisi saat ini masih tergolong wajar,” katanya

[Baca Selengkapnya....](#)



Dugaan Penjualan Tanah Kas Desa ke Perusahaan, Kades Talangkembar Dilaporkan Warga

kabartuban.com - Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan aset desa kembali mencuat di Kabupaten Tuban. Kepala Desa Talangkembar, Kecamatan Montong, Kurniali, dilaporkan ke Polres Tuban terkait dugaan penjualan tanah kas desa kepada perusahaan swasta PT Tri Putri Jaya Sakti.

Laporan tersebut diajukan oleh salah seorang warga Desa Talangkembar melalui kuasa hukumnya, Agista Yuwandhana. Meski laporan telah masuk sejak 7 Februari 2025, hingga kini perkara tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan.

Agista menjelaskan, kliennya kembali diundang dalam gelar perkara yang dilaksanakan pada 25 Mei 2026. Dalam forum tersebut, penyidik menyampaikan bahwa berkas perkara saat ini sedang diperiksa oleh Inspektorat guna mengetahui ada atau tidaknya kerugian negara.

“Pihak kepolisian menyampaikan bahwa berkas sedang diperiksa Inspektorat untuk melihat apakah terdapat kerugian negara,” kata Agista, Rabu (25/6/2026).

Menurutnya, objek yang dipersoalkan berupa tiga bidang tanah dengan total luas sekitar 1,5 hektare. Ia menyebut hingga saat ini Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) masih tercatat atas nama kas desa, namun di sisi lain telah terbit Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas nama perusahaan swasta.

Kondisi tersebut, lanjut Agista, menimbulkan pertanyaan mengenai proses peralihan hak atas aset yang diduga merupakan tanah kas desa.

Dalam laporannya, pelapor menduga terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Agista juga mempertanyakan perkembangan penanganan perkara yang dinilai berjalan cukup lama. Menurutnya, apabila proses hukum tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan, pihaknya mempertimbangkan menempuh langkah hukum berupa praperadilan.

“Kami berharap ada kepastian hukum. Jika penanganannya terus berlarut, tentu ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh,” ujarnya.

Sementara itu, Kanit Tipikor Satreskrim Polres Tuban, IPDA Andik Supriyanto, membenarkan adanya laporan....

[Baca Selengkapnya....](#)

Orang Tua Belum Reli Lepas Anak ke Asrama, Peminat SD Sekolah Rakyat Tuban Minim

kabartuban.com - Program Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Tuban mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat khususnya pada desil 1-2 menjelang tahun ajaran 2026/2027. Namun di tengah tingginya antusiasme tersebut, muncul persoalan yang cukup mencolok. Kuota siswa jenjang SD justru belum terpenuhi, sementara pendaftaran tingkat SMP dan SMA mengalami lonjakan hingga dua kali lipat dari kapasitas yang tersedia.

Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.

Dari tiga rombongan belajar (rombel) yang disiapkan dengan kapasitas masing-masing 30 siswa, jenjang SD diperkirakan baru mampu menjangkau sekitar 18 peserta didik. Sebaliknya, jumlah pendaftar SMP dan SMA terus membludak.

Kepala Dinas Sosial P3A serta PMD Kabupaten Tuban, Sugeng Purnomo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait membludaknya pendaftar di tingkat....

[Baca Selengkapnya....](#)





KONSULTASIKAN KEBUTUHAN DIGITAL ANDA!

SEMUA SOLUSI DIGITAL DALAM SATU LAYANAN!

HOT PROMO BANGUN BRAND Kuat, BISNIS MELEJIT!

nomatech@mailo.com
08 818 000 261

LAYANAN

☒ Konsultan IT	☒ Video Profile Lembaga
☒ Jasa Website	☒ Branding dan Promo Digital
☒ Media Online Lembaga	☒ Social Media Partnership
☒ Sistem Administrasi Digital	☒ E-Paper Instansi
☒ Mobile App Android	☒ E-Book Creator
☒ Web App Database	☒ Design Grafis
☒ Undangan Digital	☒ Chatboot

 SOLUSI LENGKAP

 HASIL CEPAT & TERUKUR

 PROFESIONAL & TERPERCAYA

 DORONG BISNIS ANDA LEBIH MAJU!

 **JANGAN TUNGGU!**

Waktunya Go Digital Bersama NOMATECH!